

Pengembangan Wadah Kerukunan dan Ketahanan Masyarakat Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah

Yusuf Asry

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Abstract

Dynamic of religious life in south Palu is normal and condusive. It is supported by some factors, that are conditioned among the people and it might be a model for other provinces. Actually the form of harmonious life has not been productive in terms of interreligion cooperation. Some most factors in creation of such good life are resilience developing for individual, family and interreligious community. This study is approached by qualitative research.

Keywords: religious community, harmony, conflict, heterogeniy

Abstrak

Dinamika kehidupan keagamaan di Palu Selatan berjalan kondusif ditopang oleh faktor. Hal yang penting untuk dinyatakan bahwa proses mengkondisikannya memungkinkan untuk dijadikan contoh bagi daerah lain. Namun bentuk kerukunan yang terwujud belum produktif dalam kerjasama antarkomunitas agama-agama. Faktor penting dalam upaya penciptaan harmoni adalah ketahanan individual, keluarga dan komunal antarumat beragama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif pada studi kasus.

Kata Kunci: Kerukunan, Konflik, Heterogen

Latar Belakang

Masyarakat Palu Selatan sebagai bagian dari masyarakat Kota Palu, sekaligus bagian dari bangsa Indonesia heterogen dalam etnis, budaya dan agama. Etnis asli di daerah ini tidak kurang dari 19 kelompok, dan juga terdapat enam agama yang diakui pemelukannya melalui peraturan perundang-undangan. Sekalipun heterogen, masyarakatnya hidup dalam suasana membaur, rukun dan damai (Ismail Pangeran dan Tertius Lantigimo, 16 Nopember 2012), dan terbuka dalam pergaulan keseharian (Abdul Haris, 18 Nopember 2012). Secara umum masyarakat Palu Selatan nampak mampu bertahan dari dampak konflik yang membawa-bawa “bendera agama” dari Poso, sebuah kabupaten yang berdekatan.

Sehubungan dengan hal tersebut menarik diungkapkan tentang ketahanan masyarakat Kecamatan Palu Selatan dalam memelihara kerukunan umat beragama. Pertanyaannya ialah: a) Bagaimana kondusivitas kerukunan antarumat beragama? b) Bagaimana ketahanan masyarakat dalam mensiasati pengaruh konflik? c) Bagaimana aspirasi masyarakat dalam pengembangan wadah kerukunan?

Tulisan ini bertujuan menjawab ketiga pertanyaan penelitian tersebut. Hasilnya diharapkan akan memperkaya informasi ketahanan masyarakat dan kerukunan antarumat beragama sebagai masukan pengambilan kebijakan bagi pemerintah dan pemerintah daerah, serta pemberdayaan wadah kerukunan, majelis agama, pemuka agama dan masyarakat.

Dalam tulisan ini digunakan konsep yang perlu diketahui untuk kesamaan pemahaman, yaitu ketahanan, masyarakat, konflik, wadah, dan kerukunan. Wadah ialah suatu media melakukan komunikasi dan menjembatani dialog antarindividu, kelompok dan komunitas. Wujud nyataanya berbentuk organisasi, forum, lembaga dan institusi formal maupun informal. Contohnya wadah komunikasi antarlintas agama didirikan FKUB pertama tahun 2007.

Kerukunan ialah keadaan hubungan sesama manusia yang dilandasi toleransi dalam keragaman dan kerjasama individual dalam keseharian. Kerukunan yang optimal dan produktif ialah kerjasama antarindividu atau komunitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketahanan ialah daya tangkal terhadap gangguan dan ancaman yang dapat menodai kerukunan dan kedamaian dalam bentuk benturan hingga konflik, baik pada tataran individual maupun komunal seperti keluarga dan masyarakat.

Peranan ialah tugas yang diemban untuk dilakukan. Misalnya penyelesaian berkaitan dengan IMB tentang pendirian rumah ibadat. Rumah ibadat ialah bangunan yang memiliki ciri tertentu atau yang khusus digunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama (PBM). Pemeluk agama adalah komunitas agama yang menyatakan diri meyakini dan mengikuti suatu agama tertentu. Masyarakat lokal ialah himpunan orang di suatu tempat, memiliki pola hidup budaya yang sama dan bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama.

Kegiatan ini, dari perencanaan hingga pelaporan menggunakan kerangka berpikir diawali kondisi saat ini tentang kerukunan antarumat beragama berkaitan dengan wadah kerukunan dan ketahanan masyarakat Kecamatan Palu Selatan. Wadah kerukunan lintas agama yang pertama dan utama di Indonesia ialah Wadah Musyawarah Antarumat Beragama (WMAUB) didirikan tahun

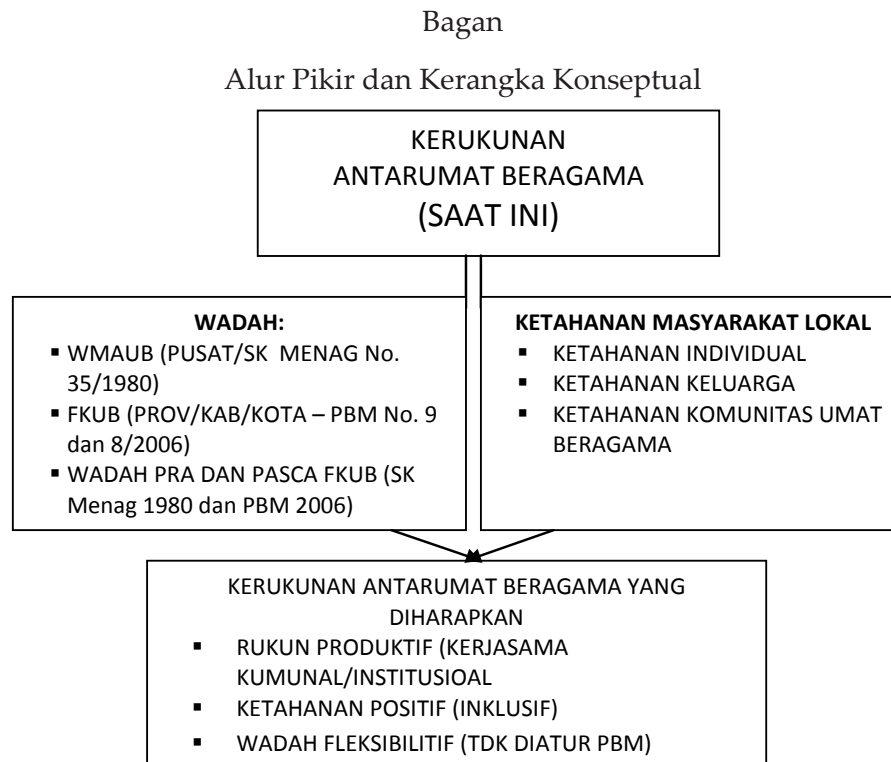
1980, dengan Keputusan Menteri Agama (Alamsyah Ratu Perwiranegara) No. 35 tanggal 30 Juni 1980.

Setelah era reformasi digulirkan tahun 1998, dan dilaksanakannya otonomi daerah, serta untuk melaksanakan amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006, maka telah dibentuk wadah yang disebut dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di 33 provinsi dan seluruh kabupaten/kota. Secara keseluruhan FKUB telah menunjukkan perannya yang positif dalam mengatasi kasus-kasus hubungan antarumat beragama dan memberikan andil besar dalam memelihara kerukunan antarumat beragama di seluruh tanah air.

Adapun FKUB kecamatan dalam Buku *Sosialisasi pbm dan Tanya Jawabnya* disebutkan: "FKUB dapat dibentuk di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa/distrik untuk kepentingan dinamisasi kerukunan, tetapi tergantung pada keperluan nyata dan setempat. Penamaannya dapat disebut FKUB kecamatan (Balitbang dan Diklat, 2012: 75). Sebagai contoh di Kota Bandung telah terbentuk Forum Komunikasi Antarumat Beragama (FKAUB) di tiap kecamatan, sebagai perpanjangan tangan FKUB Kota Bandung. Sementara di Kota Bekasi Jawa Barat, Kabupaten Jember Jawa Timur, dan di Kota Medan Sumatera Utara telah terbentuk dengan nama FKUB kecamatan.

Pada umumnya FKUB kecamatan dan/atau sejenisnya belum terbentuk di daerah lain. Demikian pula belum terbentuk di Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah ini. Dengan pembentukan FKUB kecamatan dan/atau nama lain yang diharapkan ialah terciptanya kerukunan beragama yang produktif untuk memperkuat ketahanan masyarakat lokal terhadap ancaman konflik antarumat beragama.

Dari uraian tersebut di atas dapat dituangkan dalam bagan kerangka pikir konseptual, sebagai berikut:



Sumber: Diolah Penulis, 18 Nopember 2012.

Metode

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Narasumber terdiri dari: Pemuka agama, pimpinan adat, pemuka masyarakat, aktivis pemuda, FKUB, majelis-majelis agama, pejabat terkait, anggota masyarakat dan pakar sosial budaya. Kegiatan dilaksanakan dalam waktu relatif singkat (empat hari).

Selanjutnya dilengkapi hasil telaah dokumen yang ditemukan dilapangan, dan buku yang relevan, seperti berisi kearifan lokal, “Nosarara Nosabatutu” (Bersaudara dan Bersatu”. Temuan lapangan disajikan melalui proses reduksi data, kategorisasi, komparasi dan interpretasi. Akhirnya diambil kesimpulan dan rekomendasi.

Hasil penelitian ini disajikan sebagai “makalah kunci” pada Workshop Pengembangan Wadah Kerukunan dan

Ketahanan Masyarakat Kecamatan Palu Selatan tanggal 19 Nopember 2012 di Citra Mulia Hotel Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Workshop diselenggarakan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama bekerjasama dengan Kantor Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan.

Keadaan Wilayah dan Kependudukan

Kecamatan Palu Selatan salah satu dari empat kecamatan se Kota Palu. Kota Palu merupakan satu dari 10 kabupaten/kota, sekaligus ibukota Provinsi Sulawesi Tengah. Luas wilayah Kota Palu 395,06 km² dan berbatasan sebelah utara dengan Kabupaten Donggala, selatan dengan Kabupaten Sigi, barat dengan Kabupaten Donggala dan sebelah timur dengan Kabupaten Donggala dan Kabupaten

Parigi Moutong. Penduduk Kota Palu 336.532 jiwa, dengan kepadatan 852 jiwa/km² (BPS Kota Palu, 2011 dan Buku Informasi Kota Palu, 2003:4).

Kota Palu merupakan kota migran, artinya tujuan migran baik dari desa pedalaman Sulawesi Tengah maupun dari luar seperti orang Bugis, Jawa, Minahasa dan lain-lain (Buku Informasi Kota Palu, 2003:15). Karena itu dari segi etnis dan agama cukup beragam. Jumlah penduduk dari segi agama tercatat 322.683 jiwa dengan komposisi masing-masing pemeluk agama: 258.878 Islam (80,23%), 37.670 Kristen (11,67%), 8.129 Katolik (2,52%), 7.450 Hindu (2,31%), 10.556 Buddha (3,27%). Masing pemeluk agama memiliki rumah ibadat: Islam 413 buah (49,34%), Kristen 65 buah (7,77%), katolik 2 buah (0,24%). Hindu 352 buah (42,05%), dan Buddha 5 buah (0,60%) (Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012).

Berdasarkan data tersebut, pemeluk Islam sebanyak 258.878 jiwa memiliki rumah ibadat 413 buah. Jumlah rumah ibadat ini hampir sama banyak dengan rumah ibadat Hindu mencapai 352 buah dengan pemeluknya hanya 7.450 jiwa. Sementara umat Katolik sebanyak 8.129 jiwa atau sedikit lebih banyak dari umat Hindu hanya memiliki 2 gereja. Dalam penyajian data tersebut, masih perlu penjelasan termasuk kriteria rumah ibadat yang digunakan.

Secara administratif, Kota Palu Selatan dibagi dalam 4 (empat) kecamatan dan 43 kelurahan. Luas wilayah 61,35 km² atau 15,53% dari luas Kota Palu 395,06 km² (BPS Kota Palu, 2011). Wilayah ini terletak di bagian selatan wilayah Kota Palu yang berbatasan: sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Palu Timur, sebelah Timur dengan Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, sebelah selatan dengan Kecamatan Biromaru dan

Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi, serta sebelah barat dengan Kecamatan Palu Barat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta sebagai berikut:

Penduduk di Kecamatan Palu Selatan dapat digambarkan posisi pada akhir tahun 2009 tercatat 110.261 jiwa yang terdiri 55.463 laki-laki dan 54.798 perempuan. Tingkat kepadatan penduduk mencapai 1.797 orang/km². Kepadatan penduduk per kelurahan bervariasi yang dipengaruhi oleh laju pertumbuhan dari segi kelahiran, kematian dan migrasi yang masuk maupun yang keluar.

Dari segi ekonomi Kecamatan Palu Selatan terdapat sektor jasa, perdagangan angkutan dan komunikasi. Kecamatan Palu Selatan menjadi penyumbang terbesar di bidang perekonomian Kota Palu. Sebagai daerah perkotaan mata pencaharian penduduk beragam, yaitu pedagang, wiswasta, pegawai, buruh dan petani kebun. Demikian pula di bidang pendidikan terdapat TK, SD, SMA, SMU dan sejenisnya, serta PT umum dan agama.

Secara umum, kecamatan Palu Selatan terdiri banyak kelompok etnis, seperti etnis asli Sulawesi Tengah yang terdiri dari tidak kurang 19 etnis, seperti: kaili, Kulawi, Lore, Pamona, Mori, Bungku, Saluan atau Loinang, Balantak, Mamasa, Taa, Bare'e, Banggai, Buol, Tolitoli, Tomini, Dampal, Dondo, Pendau, dan Dampelas. Etnis penduduk pendatang juga banyak di antaranya yang besar ialah Jawa, Bugis dan Makassar. Mereka hidup membaaur dan rukun.

Kehidupan Keagamaan

Penduduk Kecamatan Palu Selatan dari segi agama tercatat 100.261 jiwa. Mayoritas pemeluk Islam (76,45%). Komposisi pemeluk agama dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Komposisi Jumlah Pemeluk Agama dan Rumah Ibadat
di Kecamatan Palu Selatan
Tahun 2011

No.	Agama	Jumlah	Prosentase	Rumah Ibadat	Prosentase
1.	Islam	90.173	75,69	119	76,77
2.	Kristen	24.642	20,68	35	22,58
3.	Katolik	1.837	1,54		
4.	Hindu	1.801	1,51	-	-
5.	Buddha	676	0,57	1	0,65
6.	Khonghucu	-	-	-	-
		119.131	100,00	155	100,00

Sumber: Diolah dari data KUA Kecamatan Palu Selatan 2011

Berdasarkan data yang dapat diperoleh sebagaimana tersebut pada tabel di atas, data rumah ibadat umat Kristiani belum dipisahkan antara Kristen dan Katolik. Sedangkan Khonghucu memang belum ada

datanya.

Data rinci pemeluk agama dan rumah ibadat dari masing-masing agama perkelurahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Komposisi Jumlah Pemeluk Agama dan Rumah Ibadat
di Kelurahan Se Kecamatan Palu Selatan
Tahun 2011

No	Kelurahan	Islam (%)	Kristen (%)	Katolik (%)	Hindu (%)	Buddha (%)	Jumlah (%)
		Masjid (%)	Gereja (%)		Pura (%)	Vihara (%)	
1	Tanamodindi	9.880 (87,90) 12 (100)	1.207 (10,74)	62 (0,55)	77 (0,67)	14 (0,12)	11.240 (100) 12 (100)
2	Kawatuna	2.837 (96,89) 7 (100)	78 (2,66)	6 (0,20)	3 (0,10)	4 (0,14)	2.928 (100) 7 (100)
3	Petobo	5.859 (86,71) 10 (100)	780 (11,54)	25 (0,37)	87 (1,29)	6 (0,09)	6.757 (100) 10 (100)
4	Birobuli Selatan	5.913 (60,75) 14 (77,77)	3.136 (32,22) 4 (22,23)	345 (3,54)	309 (3,17)	30 (0,30)	9.733 (100) 18 (100)
5	Birobuli Utara	11.795 (73,34) 13 (86,66)	3.321 (20,65) 1 (6,67)	351 (2,18)	565 (3,51)	51 (0,32) 1 (6,67)	16.083 (100) 15 (100)
6	Tatura Selatan	6.780 (57,31) 9 (75,00)	4.625 (39,09) 3 (25)	194 (1,64)	179 (1,51)	42 (0,35)	11.830 (100) 12 (100)
7	Tatura Utara	14.271 (75,79) 14 (56,00)	4.005 (21,27) 11 (44)	263 (1,40)	196 (1,04)	95 (0,50)	18.830 (100) 25 (100)
8	Lolu Selatan	8.257 (68,21) 10 (83,33)	3.278 (27,08) 2	180 (1,49)	195 (1,61)	196 (1,62)	12.106 (100) 12 (100)
9	Lolu Utara	6.852 (64,82) 13 (48,15)	3.111 (29,43) 14 (51,85)	318 (3,01)	103 (0,97)	187 (1,77)	10.571 (100) 27 (100)
10	Tavanjuka	3.706 (92,28) 5 (100)	262 (6,52)	12 (0,30)	14 (0,35)	22 (0,55)	4.016 (100) 5 (100)
11	Palupi	8.139 (90,78) 6 (100)	676 (7,54)	67 (0,75)	57 (0,64)	27 (0,30)	8.966 (100) 6 (100)
12	Pengawu	5.884 (96,76) 6 (100)	163 (2,68)	14 (0,23)	16 (0,26)	4 (0,06)	6.081 (100) 6 (100)
	Jumlah	90.173 (75,69) 119 (76,77)	24.642 (20,68) 35 (22,58)	1.837 (1,54)	1.801 (1,51) -	676 (0,57) 1 (0,65)	119.131 (100) 155 (100)

Sumber: Diolah dari data KUA Kec. Palu Selatan 2011

Berdasarkan data pada tabel di atas, tiap kelurahan terdapat penganut agama. Hanya dari segi jumlah ada yang besar dan ada yang kecil. Misalnya umat Islam terbanyak di semua kelurahan dibandingkan pemeluk agama lain. Penganut Islam terbesar di kelurahan di atas 90% pada tiga kelurahan, yaitu: di Kawatuna (96,86%), Pengawu (96,76%), di Tuwanjuka (92,28%), dan Palupi (90,78%). Di kelurahan ini tidak terdapat gereja, karena jumlah pemeluknya dan pemeluk agama lain kecil.

Kelurahan yang besar jumlah pemeluk Kristen ialah di Kelurahan Biroboli Selatan 3.136 jiwa (32,22%) terdapat 4 gereja (22, 23%), di Kelurahan Tatura Utara (4.005 jiwa (21,27) terdapat 11 gereja (44%) dan di Lolu Utara 3.111 jiwa (29,43) terdapat 14 gereja (51,85%). Katolik dan Hindu belum tercatat jumlah rumah ibadatnya. Sedangkan rumah Ibadat Buddha hanya satu di Kelurahan Birobuli Utara 51 jiwa (0,32) terdapat 1 (6,67). Sebenarnya jumlah rumah ibadat terus berkembang sehingga diperlukan pendataan ulang.

Rohaniawan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Selatan terdiri dari: Islam 186 orang, Kristen 27 orang, Katolik 8 orang, Hindu 7 orang. Sedangkan untuk rohaniawan Buddha serta Khonghucu belum terdata (KUA Kec. Palu Selatan, 2010).

Ketahanan Masyarakat Palu Selatan

Jenis dan Faktor Penyebab Konflik

Heterogenitas penduduk Palu Selatan berpotensi konflik. Potensi konflik yang dapat dan pernah muncul perselisihan dan benturan kepermukaan serta faktor penyebabnya. Jenis dan penyebab konflik di Kecamatan Palu

Selatan terdiri dari: (1) Konflik antaretnis karena sentimen solidaritas keetnisan. (2) Konflik antarumat beragama karena pedirian rumah ibadat yang belum mengacu pada PBM tahun 2006. (3) Konflik antarumat beragama karena rasa dendam akibat konflik di Poso yang melibatkan agama, dan (4) Konflik sosial antarwarga karena kesenjangan sosial ekonomi.

Konflik antaretnis karena sentimen solidaritas keetnisan. Biasanya dipicu oleh kenakalan remaja. Berawal dari masalah individual terutama masalah miras, berlanjut pada konflik komunal antarpemuda dan antarkampung, seperti yang pernah terjadi antara etnis Bugis (pendatang) dengan entis Kaili (penduduk asli) di Kelurahan Birobuli (Lutfi Harun, 17 Nopember 2012). Sejak tahun 2010 secara sporadic terjadi tawuran antarwarga kelurahan dan kampung di berbagai tempat disebabkan miras dan pembusuran terhadap warga tertentu dari kelompok pemuda/remaja yang tak dikenal di daerahnya. Hal ini bagi warga menjadi tanda tanya, diprediksi ada skenario rekayasa (*by design*), tetapi sulit dibuktikan (Abdul Haris, 17 Nopember 2012).

Konflik antarumat beragama karena pedirian rumah ibadat yang belum mengacu pada PBM tahun 2006. Warga yang menolak pendirian gereja karena belum memenuhi aturan PBM, dan/atau pembangunan rumah ibadat secara tiba-tiba tanpa pendekatan budaya dan komunikasi terlebih dahulu dengan pemuka agama dan warga. Dalam pemberian rekomendasi oleh FKUB dan Kantor Kementerian Agama Kota Palu terkesan tertutup, dan hasil investigasi harus dicek pada penandatanganan dari pengguna rumah ibadat dan persetujuan warga secara benar. Demikian dinyatakan oleh seorang Ketua RW/pengusuh Adat Wilayah Palu Selatan dan Ketua Forum Komunikasi Pemuda Kaili.

Kasus tidak langsung konflik antarumat, tetapi lebih pada dendam pribadi juga pernah terjadi. Misalnya penembakan seorang pendeta saat kembali dari membeli material bahan bangunan. Begitu juga penembakan seorang pendeta sedang berkhotbah di mimbar sebuah gereja. Hasil interogasi terhadap pelaku, menyatakan “balas dendam”, karena banyak keluarga yang dibunuh secara sadis di Poso.

Menarik ungkapan seorang warga imam di Masjid al Amin, bahwa dulu di sekitar tempat tinggalnya terdapat 5 tempat peribadatan umat Kristen, karena diduga pengikutnya sedikit dan peminatnya kecil saat ini tinggal sebuah gereja saja. Namun relasi antarumat beragama berjalan harmonis, dia sendiri sering menghadiri undangan syukuran dari warga Hindu yang memiliki pura di depan rumahnya.

Pada tahun 2000-an pernah terjadi peledakan bom di sebuah pasar di Jln. Sulawesi, Kelurahan Lolu, Kecamatan Palu Selatan. Di pasar tersebut sebelumnya penjualan daging babi dalam kondisi tertutup, lalu tiba-tiba dilakukan penjualan secara terbuka di lingkungan penduduk mayoritas Muslim. Inilah mungkin bentuk reaksi dari warga sekitarnya. Kasus ini dapat diselesaikan, dan tidak berkelanjutan pada konflik antar Muslim dan Kristiani.

Konflik sosial antarwarga karena kesenjangan sosial ekonomi. Penduduk pendatang karena keuletannya dalam usaha dan kerja banyak berhasil dengan kondisikehidupanekonomilebihsejahtera dari penduduk asli setempat. Akibatnya terjadi kesenjangan dan pengangguran yang menimbulkan kecemburuan sosial. Dalam kondisi tersebut konflik sosial rawan terjadi dengan pemicu masalah “sepele” terutama kenakalan remaja, yaitu minuman keras (miras). Dalam

hal ini ada ungkapan, “mengkonsumsi miras di Sulawesi Utara mabok masuk got, sedangkan di Sulawesi Tengah mabok bikin rebut” (Ismail Pangeran, 16 Nopember 2012).

Sebagai contoh kasus yang terjadi pada bulan Oktober 2012 tawuran antarwarga kelurahan Tawanjuka dengan Kelurahan Pengawu yang dipicu oleh pemuda minum miras, dan diduga ada provokatornya. Sebab pemuda mampu membeli miras, secara logika tentu mereka memiliki sejumlah uang karena belum bekerja alias pengangguran. Demikian terjadi tawuran antara warga kelurahan Tawanjuka dengan kelurahan Palupi yang dipicu miras.

Pada saat penelitian ini dilakukan, Minggu tanggal 18 Nopember 2012 pukul 13.30 wita terjadi tawuran antarkampung di Palu Selatan. Kelurahan Tawanjuka mendapat serangan dari sejumlah massa dari Kelurahan Nunu, Tatanga, dan Kelurahan Pengawu. Massa Kawanjuka juga menunggu bantuan dari Porame dan Balane. Ada rumah yang terbakar, dan 7 orang luka dari kedua belah pihak. Ada yang terkena serpihan dum-dum dan terkena peluru gotri. Diduga 12 pengasut perkelahian antarkampung dan berpindah-pindah dengan memancing kemarahan warga yang mengatasnamakan kampung berseberangan (Berita SMS Dir. Binmas Polda). Namun dapat diatasi oleh pihak kepolisian.

Pernah terjadi kasus seupa Namun terdapat kebijakan pemerintah dan aparat setempat, pernah direkrut pemuda putus sekolah dan belum kerja dipekerjaan di sebuah Maal untuk petugas sekuriti, pramuniaga dan clanning service, bahkan ada yang diangkat sebagai Satpo PP. Setelah itu tidak lagi terjadi tawuran dan kenakslan remaja di daerah tersebut.

Konflik sosial antar etnis atau antarumat beragama karena penyelesaian

kasus lama yang tidak tuntas. Sementara kasusnya meredam, tetapi pada saat terdapat pemicunya dengan mudah dan cepat muncul kembali sebagai konflik laten (Tertius Lantogimo, 16 Nopember 2012). Beberapa kasus pendirian rumah ibadat di Palu Selatan mendapat penolakan warga. Namun ada yang hingga saat ini terhenti pembangunannya dalam tanda pertik, seperti gereja di Jl. Kijang, dan ada pula secara diam-diam melanjutkan pembangunannya.

Konflik internal masing-masing komunitas agama diprediksi muncul lebih besar dari konflik antarumat beragama ke depan. Faktornya ialah perbedaan paham keagamaan dan aliran sempalan. Namun masyarakat Palu ramah asalkan adat dijaga bersama. Pada dasarnya sumber konflik muncul dari adanya kesenjangan sosial ekonomi, di mana penduduk pendatang memiliki tingkat kehidupan yang lebih baik. Karena itu perlu keterampilan usaha ditingkatkan seperti melalui pelatihan kewira-usahaan (*enterprenership*) (Lutfi Harun, 17 Nopember 2012).

Ketahanan Individul, Keluarga dan Komunitas Agama

Ketahanan di sini dalam arti daya tangkal mampu menolak timbulnya konflik yang mengganggu kerukuna dan kedamaian. Ketahanan di sini meliputi: ketahanan individual, keluarga dan komunitas umat beragama.

Ketahanan individual warga Kecamatan Selatan dalam menangkal konflik antaruma beragam secara umum cukup tinggi. Ditandai dengan pembelajaran dari kasus konflik yang terjadi terutama dari konflik sosial di Kabupaten Poso. Kasus Poso yang melibatkan komunitas agama (Kristen-Islam) adalah merugikan dan

mendatangkan korban bagi masyarakat. Sementara yang mengambil keuntungan pihak tertentu, seperti promosi jabatan, mendapat keuntungan secara materiil, dan proyek pembangunan infrastruktur terutama bagi pengusaha. Namun diakui oleh para narasumber, bahwa kondisi kehidupan dewasa ini ditandai orang tua sibuk urusan ekonomi keluarga, pendidikan agama dan karakter serta kerukunan lemah. Ngaji di rumah bagi anak-anak hampir tidak intensif lagi, kehidupan guru ngaji kurang diperhatikah oleh pemerintah dan orang tua dari anak didik, bahkan orang tua mulai lemah kontrol terhadap ketahanan mental-spititual anak-anaknya.

Ketahanan keluarga di Kecamatan Palu Selatan dalam menangkal konflik antaragama juga cukup kuat. Ditandai dengan tidak adanya kasus pindah agama karena banyak masjid. Demikian pula tidak ada pindah agama karena bangunan gereja yang besar dan indah. Masing-masing keluarga tetap pada identitas keagamaannya, tanpa mengurangi kemerdekaan memilih agama yang diyakininya, sebagaimana terjadi pada peristiwa pernikahan. Namun harmoni tetap terjalin karena diikat oleh sistem kekerabatan yang dekat (As'ad Latupada, 15 Nopember 2012).

Ketahanan komunitas masing-masing umat beragama juga kuat. Ditandai dengan tidak mudah terpancing oleh isu yang datang dari luar yang mengadu domba antarumat beragama. Di samping itu biasanya juga tidak memancing terjadinya konflik. Pada dasarnya watak masyarakat Palu Selatan ramah dengan niali-nilai adat hidup yang mengutamakan kerukunan dan kedamaian (Ismail Pangeran dan Tertius Lantigimo, 16 Nopember 2012). Namun kasus dapat terjadi oleh dan ulah provokator yang biasanya datang dari luar.

Pengalaman Penanganan Konflik

Kearifan Lokal

Kearifan lokal merupakan konsensus masyarakat lokal yang menjadi sendi utama untuk terpeliharanya kerukunan dan kedamaian. Kearifan lokal dipegang teguh oleh masyarakat Kecamatan Palu Selatan ialah “Nosarara Nosabututu”. Artinya “Bersaudara dan Bersatu”. Kata-kata ini adalah untuk pembangun daerah, tatpi jugaterkait dengan kerukunan. Karena tidak mungkin mebnagun daerah dengan lancartan kerjasama dalam suasana persaudaraan, tidak dapat membangun dengan diri sendiri, melainkan harus bersama-sama.

Di sisi lain kearifan tersebut menjadi perekat bagi masyarakat yang heterogen dalam etnis dan agama. Asalnya dari istilah etnis Kaili. Kemudian dipopulerkan sebagai semboyan dalam masyarakat Palu oleh Rusdy Mastura, Walikota Palu. Dalam bsnyak hal diselesaikan dengan pendekatan pada kearifan lokal, “Nosarara Nosabututu”.

Semboyan “Nosarara Nosabututu” menjadi semboyan Kota Palu yang sejak turun temurun hidup ditengah masyarakat, dan khususnya pada masyarakat dari etnis Kaili. Walikota H. Rusdy memprakarsai untuk revitalisasi dan sosialisasi semboyan tersebut. Kalimat petuah ini telah diseminarkan, dan telah diikrarkan pemetiah dan masyarakat Palu. Masyarakat Kota Palu adalah bersaudara dan bersatu tanpa membedakan susku, agama, ras dan golongan. Petuah iniakan selalu didengunkan guna memupuk nilai-nlasi kebersamaan dari segenap komponen masyarakat Kota Palu yang heterogen. Namun belum ditetapkan melalui Peraturan daerah (Perda) (Rusdy Mastura dalam Adjimin Ponulele, 2008: iii-iv).

Peran Tokoh Adat/Masyarakat dan FKUB

Pada era Orde Reformasi yang digulirkan pada tahun 1998, para tokoh adat dan masyarakat mulai diberdayakan, yang pada era Orde Baru termarginalkan dengan kebijakan yang mengedepankan fungsi pemerintahan kelurahan/desa. Dalam banyak hal masyarakat masih komitmen dengan peran ketokohan adat. Karenanya para tokoh adat mulai diperankan sebagai mitra pemerintah dalam mengelola dan mengatasi masalah sosial kemasyarakatan. Peran tokoh adat dominan pada masing-masing komunitas etnis. Di Palu adat relatif masih kuat. Adat menjadi salah satu peraturan, dimana pemerintah mengatur masalah kemasyarakatan.

Sejak tahun 2006 oleh Walikota Rusdy Mastura dibentuk Dewan Adat Kota Palu dengan Ketua Umum Drs. H. Adjimin Ponulele (periode 2006-2011). Selain itu terdapat Majelis Adat ditingkat kecamatan dan Pemangku Adat ditingkat kelurahan/desa. Fungsi adat semakin difungsikan, hukum adat dilestarikan agar didengar petuah orang yang dituakan, dan sebagai mitra pemerintah menyelesaikan persoalan sosial kemasyarakatan (Latif Harun, 17 Nopember 2012).

Peran FKUB semakin dirasakan oleh seluruh komunitas pemeluk agama, terutama kepengurusan yang dilantik Februari 2012 dibawah kepemimpinan Drs. Ismail Pangeran, M.Pd.I. FKUB. Pada periode ini ditandai dengan:

1. Penerusan tradisi hidup rukun dan damai yang terkondisikan sejak masa silam.
2. Pelaksanaan PBM secara konsisten.
3. Penangkalan pengaruh provokator kerusuhan yang umumnya datang dari luar agarmasyarakat tidak mudah

terpancing dan tidak memancing konflik dalam masyarakat.

4. Penyosialisasikan pendekatan penyelesaian masalah melalui pendekatan budaya dan komunikasi antar warga.
5. Kegiatan prioritas FKUB ialah dialog, turun ke semua kecamatan, dan telah dilakukan pada 6 dari 8 kecamatan se Kota Palu. Dialog untuk memperoleh masukan atau menampung aspirasi masyarakat. Pelaksanaan peran FKUB menghadapi keterbatasan fasilitas kesekretariatan dan pendanaan kegiatan.
6. Penyelesaian kasus dan permohonan pendirian rumah ibadat dilakukan secara teliti dan “relatif” cepat. Semua permohonan pendirian setelah terpenuhi persyaratan sesuai aturan PBM diberikan rekomendasi persetujuan. Selama periode terakhir tiga usulan dan ketiga direkomendasikan diterima permohonannya, setelah disahkan 90 pengguna rumah ibadat dan 60 dukungan warga yang dicek kebenarannya, kemudian dibawa dalam rapat FKUB yang dihadiri oleh Ketua Dewan Penasihat yang *nota bene* ialah Wakil Walikota.

Peranan Pemerintah Kota Palu dan jajarannya

Menurut ketua FKUB, bahwa sejauh ini perhatian pemda pada FKUB dinyatakan, “keberadaan FKUB dimata pemerintah daerah “ada tetapi tidak ada”. Dalam istilah lain “kepala dilepas ekor diikat”. Misalnya alamat sekretariat FKUB di Kantor Kementerian Agama Kota Palu yang menempel pada Seksi Penamas. Namun telah diberikan ruangan bekas ruko berserta fasilitas yang terbatas, dan dalam waktu dekat akan ditempati di Jalan Zebra, Palu.

Pengembangan Wadah Kerukunan

Heterogenitas yang Harmoni Miskin Kerjasama

Masyarakat Kecamatan Palu Selatan dan umumnya masyarakat Kota Palu adalah cukup heterogen dan multikulturalistik. Areanitu resiko resiko muncul konflik cukup potensial. Namun dengan kearifan lokal, karamahan masyarakat asli, peran FKUB dan pemerintah Kota Palu serta Kementerian Agama dalam memelihara kerukunan di daerah ini tercipta harmoni hubungan antarumat beragama.

Idealnya kehidupan antarumat beragama yang harmonis dan rukun bukan hanya dalam perjalanan hidup keseharian, tetapi lebih dari itu terdapat kerjasama institusional dan kumunal antarumat beragama. Kerjasama yang terjadi selama terbatas pada kunjungan silaturahmi pada hari-hari besar keagamaan secara individual atas kesadaran masing-masing, seperti pada acara halal bihalal (Islam) dan Natalan (Kristiani). S

Semua komunitas umat beragama peduli penanggulangan korban bencana alam. Sebagai contoh Banjir Bandang di Parigi. Semua umat bergama memberikan bantuannya. Namun masing-masing tanpa koordinasi oleh dan atas nama umat beragama. Demikian pula di dunia pendidikan. Menurut narasumber penelitian ini, seorang pendeta dan dosen di Sekolah Tinggi Teologia di Palu, bahwa di bidang pendidikan belum tersentuh adanya kerjasama antarumat beragama.

Aspirasi Masyarakat tentang Wadah Kerukunan

Wadah kerukunan umat beragama baru berdiri FKUB Provinsi Sulawesi Tengah dan ke-13 kabupaten/kota. Lembaga kerukunan umat

beragama lintas agama belum ada selama ini. Memang terdapat organisasi pemuda yang memiliki kegiatan kerukunan yang sifatnya insidental, seperti Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Anshar Nahdlatul Ulama (NU) dan Karang Taruna. Namun organisasi tersebut dan sejenisnya belum spesifik dalam pemeliharaan umat Beragama.

Berkenaan dengan wadah kerukunan umat bergama diperoleh masukan dari para nara sumber, yang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: a) FKUB kecamatan belum urgen didirikan. Perlu penguatan FKUB kabupaten/kota. b) FKUB kecamatan urgen didirikan. FKUB ini sebagai kepanjangan tangan FKUB kabupaten/kota.

Pertama, Penguatan FKUB kabupaten/kota. FKUB diberdayakan secara optimal, baik sumber daya manusia (SDM)-nya maupun intensitas kegiatan agar menjangkau kecamatan dan kelurahan dan frekwensinya. Dengan demikian FKUB kecamatan dirasakan belum mendesak atau urgen didirikan saat ini. Di samping itu akan kesulitan masalah fasilitas serta kesekertarian, juga jumlah penduduk relatif belum besar. Karena itu pada waktu yang tepat dapat didirikan. Dengan pertimbangan kasus-kasus antarumat beragama sangat kecil jumlahnya. Sebagai contoh dalam 10 bulan terakhir ini FKUB hanya menangani 3 permohonan tiga gereja.

Kedua, Pembentukan FKUB kecamatan. FKUB ini sebagai kepanjangan tangan FKUB kabupaten/kota. Dengan alasan, memudahkan deteksi dini potensi konflik, dan pemeliharaan kerukunan umat beragama. Di samping itu untuk efektivitas pengecekan persyaratan pendirian rumah ibadah yang sarat dengan menimbulkan tanda tanya dan dipermasalahkan oleh warga.

Penutup

Dari segi wadah kerukunan antarumat beragama, pada masyarakat Kecamatan Palu Selatan, selain belum ada FKUB kecamatan juga belum pernah ada wadah forum lintas agama atau sejenisnya yang berkembang di masyarakat. Namun kehadirannya dinilai tepat, karena ditengah kerukunan antarumat beragama kondusif cukup rukun tetapi rawan konflik.

Potensi itu nampak menonjol ialah a) Sentimen solidaritas keetnisan yang berkelindan dengan ekonomi, b) Pendirian rumah ibadah yang belum mengacu pada PBM tahun 2006 dan kesahihan pendataan pengguna rumah ibadah dan persetujuan warga. c) Ketegasan pihak lurah dan camat dalam mengamankan amanat PBM masih diperlukan. d) Jalan pintas panitia pembangunan rumah ibadah dalam memperoleh rekomendasi dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)".

Di samping itu ketahanan masyarakat dihadapkan pada: a) Pengaruh media massa yang menayangkan konflik kekerasan. b) Sementara pemuda dan remaja pengangguran rawan terhadap pengaruh provokator, dan terlibat pada tindakan kriminal dengan miras sebagai pemicunya.

Derajat kerukunan antarumat beragama dalam tulisan ini dapat dibedakan pada empat kategori, yaitu: a) Kondusif sangat rukun, dengan indikasi tidak pernah terjadi konflik antarumat beragama secara terbuka (*manifest*) dan tidak ada kasus penolakan pendirian rumah ibadah yang sempat ditunda pembangunannya dan dicabut rekomendasi, dan atau IMB-nya. b) Kondusif rukun dengan indikasi dengan indikasi tidak pernah terjadi konflik antarumat beragama secara terbuka (*manifest*) dan ada kasus penolakan pendirian rumah ibadah yang sempat ditunda pembangunannya tetapi dapat

diselesaikan dengan saling pengertian. c) Kondusif cukup rukun dengan indikasi tidak pernah terjadi konflik antarumat beragama secara terbuka (*manifest*) dan ada kasus penolakan pendirian rumah ibadat yang sempat ditunda pembangunannya tetapi dapat diselesaikan dengan saling pengertian, dan melengkapi kekurangan peryaratannya. d) Kondusif kurang rukun dengan indikasi pernah terjadi konflik antarumat beragama secara terbuka (*manifest*), dan ada kasus penolakan pendirian rumah ibadat yang sempat ditunda pembangunannya, dan harus melengkapi kekurangan peryaratannya. e) Kondusif tidak rukun dengan indikasi pernah terjadi konflik antarumat beragama secara terbuka (*manifest*), dan ada kasus penolakan pendirian rumah ibadat. Jika melihat dari derajat kerukunan antarumat beragama di Kecamatan Palu Selatan saat ini cenderung pada kondusif rukun dengan rawan konflik.

Dari segi kemungkinan pendirian FKUB kecamatan di Kecamatan Palu Selatan dengan melihat pertimbangan seperti tersebut di atas, maka sebaiknya dibentuk FKUB kecamatan dan/atau dengan nama lain, sebagai *pilot project* kerukunan. Hal ini, selain suatu kebutuhan nyata juga dibanerkan oleh PBM, tidak akan mengurangi peran FKUB yang ada, bahkan dapat memberikan bantuan pelaksanaan tugas dan kaderisasi SDM perdamaian dan kader pelanjut FKUB.

Keuntungan dari dibentuknya FKUB kecamatan, antara lain:

1. Dibenarkan oleh PBM Tahun 2006. Melengkapi struktur hirarki organisasi Pemeliharaan kerukunan dari pusat hingga daerah, yaitu BMAUB (pusat), FKUB Provinsi, Kabuapten/ Kota hingga kecamatan dan kelurahan/desa.
2. Merupakan kepanjangan tangan FKUB kabupaten/kota diharapkan dapat melakukan deteksi dini potensi konflik.
3. Memelihara kerukunan antarumat beragama, sebagai garda terdepan.
4. Membantu pengecekan administrasi persyaratan pendirian rumah ibadat, seperti kasehan tanda tangan pengguna dan dukungan warga.
5. Mendukung sosialisasi dan implemantasi kearifan lokal, secara khusus semboyan "Norasara Norabatutu" (Bersaudara dan bersatu" dalam membangun Kota Palu yang maju secara fisik materiil dan yang rukun dan damai secara spiritual, etnis dan agama.

Kelemahan dari dibentuknya FKUB kecamatan, antara lain:

6. Fasilitas dan pendanaan tidak dimuat dalam PBM.
7. Bentuk organisasi dan tugas pokoknya tidak diatur dalam PBM.
8. Kurang perhatian dari Kantor Kecamatan dan Kantor Urusan Agama.
9. Kehawatiran penyalahgunaan peran FKUB kecamatan.

Kesimpulan

Dari temuan penelitian, analisis dan pertanyaan penelitian diambil sejumlah kesimpulan: Relasi antarumat beragama di Palu Selatan adalah kondusif cukup rukun. Selain karena sosialisasi dan peranan kearifan lokal "Nasarara Nasabatutu" (Bersaudara dan Barsatu) dan faktor keramahan penduduk etnis setempat maupun peran tokoh adat/pemuka agama, serta intensitas peran FKUB. Namun bentuk kerukunan saat ini belum produktif dalam kerjasama antarkomunitas agama-agama.

Ketahanan masyarakat Palu Selatan secara umum kondusif cukup tinggi, karena tidak mudah terpancing isu provokator, ketahanan keluarga melalui pembinaan keimanan yang diikat dengan tali kekerabatan, dan ketahanan komunitas agama melalui dan kemerdekaan dalam beragama. Dengan demikian faktor rawan konflik dapat diredam terutama sentimen solidaritas keetnisan yang terkait dengan ekonomi, pedirian rumah ibadah yang menyalahi aturan PBM, dan kesenjangan sosial ekonomi yang menghasilkan pengangguran. Namun ketahanan individual, keluarga dan komunal antarumat beragama riskan oleh pengaruh fenomena tauran, kenakalan remaja dengan “miras”nya, dan tayangan konflik kekerasan oleh media massa.

Dalam pandangan masyarakat bahwa wadah kerukunan -FKUB- perlu terus dukungan oleh semua pihak agar semakin berdaya dalam memelihara kerukunan antarumat beragama, baik dalam bentuk fasilitas dan pendanaan dari pemerintah daerah dan kantor kementerian agama maupun dalam penyiapan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) kader kerukunan/perdamaian oleh masyarakat.

Wadah kerukunan lintas agama telah terbentuk FKUB Kota Palu tahun 2007. Sedangkan FKUB dan sejenisnya di Kecamatan Palu Selatan belum ada. Aspirasi masyarakat melalui pendapat para narasumber terdapat tiga pilihan (opsi), yaitu: (1) FKUB kecamatan dan/atau sejenisnya dinilai belum mendesak (urgen) didirikan, karena kerukunan umat beragama “relatif” kondusif, dan jumlah penganut agama belum besar. (2) FKUB kecamatan sebaiknya dibentuk sebagai *pilot project* kerukunan, karena terdapat banyak faktor rawan konflik antarumat beragama, tidak akan mengurangi peran FKUB, bahkan dapat memberikan bantuan pelaksanaan tugas pokoknya dan kaderisasi SDM perdamaian dan

kader pelanjut FKUB, serta berperan investigator permasalahan kerukunan.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian, pembahasan, dan kesimpulan di atas, maka dirumuskan rekomendasi.

Kearifan lokal “Nasarara Nasabatutu” (Bersaudaradan Bersatu) dan sejenisnya yang mendukung kerukunan antarumat beragama hendaknya selain disebar-luaskan kepada masyarakat juga disosialisasikan agar dapat menjadi acuan bersama pedoman PBM.

Penyelesaian konflik sosial-keagamaan, batapa-pun kecilnya hendaknya diselesaikan secara cepat, adil sesuai hukum, dan tuntas sehingga tidak menjadi potensi konflik laten yang dapat mengemuka pada saat terdapat faktor pemicunya.

Pemberdayaan pemuda/remaja putus sekolah dan pengangguran oleh pemerintah daerah dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan (*enterpreunership*), pemberian dana stimulan dan pendampingan, serta direkrut untuk pekerjaan bidang sekuriti, Satpol PP, parkir, peramuniaga dan sejenisnya. Dengan demikian akan dapat meminimalisasi kesenjangan sosial ekonomi antarwarga dan antarkomunitas agama.

FKUB bersama pemerintah daerah dan kantor kementerian agama Kota Palu dan kecamatan hendaknya memotivasi tercipta kerjasama antarkomunitas agama untuk kerjasama di bidang sosial-keagamaan, seperti melalui kegiatan olahraga, kesenian, dan usaha ekonomi, serta mentradisikan budaya silaturahmi antarpemuka agama pada hari-hari besar keagamaan.

Pengembangan kualitas SDM kerukunan dan intensitas peran wadah – FKUB- hendaknya masyarakat mengikuti program FKUB dengan serius, dan untuk diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan barbangsa.

Banyak manfaatnya pembentukan wadah FKUB kecamatan, selain dibenarkan oleh peraturan (PBM) dan sangat fleksibel akan sangat membantu pelaksanaan tugas FKUB kabupaten/kota, dan sekaligus merupakan wadah

kaderisasi kerukunan dan perdamaian. Dalam Buku *Sosialisasi PBM dan Tanya Jawabnya* dinyatakan “FKUB dapat dibentuk di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa/distrik untuk kepentingan dinamisasi kerukunan, tergantung pada keperluan nyata dan kesepakatan pemuka agama setempat, dengan sebutan FKUB atau bukan FKUB, tetapi tidak memiliki tugas formal sebagaimana FKUB tingkat provinsi dan kabupaten/kota” (Balitbang dan Diklat Kemenag, 2011: 75-76).

Daftar Pustaka

- Ahmad, Haidlor Ali, (editor) *Revitalisasi Wadah Kerukunan di Berbagai Daerah di Indonesia*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta, 2009.
- Badan Pusat Statistik Kota Palu, *Palu dalam Angka 2010*, Palu, 2011.
- Kustini (Editor), *Peranan Kerukunan Umat Beragama dalam Pelaksanaan Pasal 8, 9 dan 10 Peraturan Berasama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta, 2010.
- , *Efektivitas Sosialisasi PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta, 2009.
- Ponullele, Adjamin, dkk., *Nosarara dan Nosabatutu*, Palu, 2008.
- Selayang Pandang Kota Palu*, Palu, 1997